



*Perdana*

## PROVINSI SULAWESI SELATAN

### KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 616 / XII/2015

#### TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KEPADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan efisien pemungutan dan penerimaan daerah, perlu menata kembali pelimpahan pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

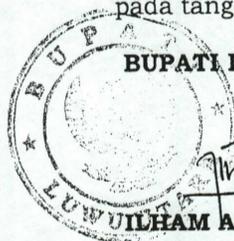
Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa :
- a. kewenangan pemungutan yakni suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentu besarnya pajak atau retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran; dan
  - b. kewenangan penagihan yakni melakukan kegiatan penerimaan setoran wajib Pajak Daerah atau wajib Retribusi Daerah untuk selanjutnya di setor ke Kas Daerah.
- KETIGA : Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berupa :
- a. untuk Pajak Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan langsung dengan jenis penerimaan Pajak Daerah;
  - b. untuk jenis penerimaan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan Retribusi Daerah; dan
  - c. pemungutan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/327/VII/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 10 Desember 2015



**BUPATI LUWU UTARA,**

**ILHAM A. GAZALING**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 616 / XI/2015**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

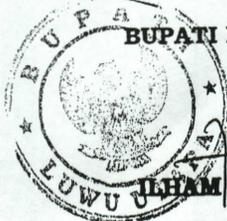
| NO                               | JENIS PENERIMAAN   | NAMA SKPD  | JENIS KEWENANGAN |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| 1                                | 2  | 3  | 4                |
| <b>I. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b> |  |  |                  |
| <b>A. PAJAK DAERAH</b>           |  |  |                  |
| 1                                | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                         | Dinas Pertambangan dan Energi                      | Penagihan        |
| 2                                | Pajak Hiburan  | Kecamatan  | Penagihan        |
| 3                                | Pajak Reklame  | DPPKAD   | Pemungutan       |
| 4                                | Pajak Hotel  |  |                  |
|                                  | - Pajak Tetap  | Kecamatan  | Penagihan        |
|                                  | - Insidentil   | DPPKAD   | Pemungutan       |
| 5                                | Pajak Restoran   |  |                  |
|                                  | - Pajak Tetap  | Kecamatan  | Penagihan        |
|                                  | - Insidentil   | DPPKAD   | Pemungutan       |
| 6                                | Pajak Penerangan Jalan                                       | PLN  | Penagihan        |
| 7                                | Pajak Parkir   | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika      | Penagihan        |
| 8                                | Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan              | DPPKAD   | Pemungutan       |
| 9                                | Pajak Air Tanah  | DPPKAD   | Pemungutan       |
| <b>B. RETRIBUSI DAERAH</b>       |  |  |                  |
| 1                                | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                          | SKPD Terkait                                       | Pemungutan       |
| 2                                | Retribusi Izin Gangguan                                      | Kecamatan  | Pemungutan       |
| 3                                | Retribusi Terminal   | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika      | Pemungutan       |
| 4                                | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                | Dinas Kesehatan (Puskesmas)                        | Pemungutan       |
| 5                                | Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum                          | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika      | Pemungutan       |
| 6                                | Retribusi Pelayanan Pasar                                    | Kecamatan  | Pemungutan       |
| 7                                | Retribusi Rumah Potong Hewan                                 | Dinas Pertanian                                    | Pemungutan       |
| 8                                | Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil               | Pemungutan       |
| 9                                | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                    | Dinas Pertanian/Dinas Kelautan dan Perikanan       | Pemungutan       |
| 10                               | Retribusi Izin Pengujian Kendaraan Bermotor                  | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika      | Pemungutan       |
| 11                               | Retribusi Pelayanan Sampah dan Kebersihan                    | Dinas PU   | Pemungutan       |
| 12                               | Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Andi Djemma          | RSUD Andi Djemma                                   | Pemungutan       |
| 13                               | Retribusi IMB  | Dinas PU   | Pemungutan       |
| 14                               | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga                      | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Pemungutan       |
| 15                               | Surat Izin Trayek  | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika      | Pemungutan       |

1. Perca No. 14 thn 2011  
 2. Perca No. 14 thn 2011  
 3. Perca No. 14 thn 2011

- Sp. pdrmpahan kewenangan 2012 No. 188.4.45/527/VII/2013, 17-07-2013

| NO         | JENIS PENERIMAAN  | NAMA SKPD                                     | JENIS KEWENANGAN |
|------------|---|---|------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                |
| 16         | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang   | Dinas Koperindag                              | Pemungutan       |
| 17         | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Pemungutan       |
| 18         | Retribusi Izin Usaha Perikanan  | Dinas Pertanian/Dinas Kelautan dan Perikanan  | Pemungutan       |
| <b>C</b>   | <b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b> |   |                  |
| 1          | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMN (PT.Bank Sul-Sel)     | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>D</b>   | <b>LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>   |   |                  |
| 1          | Hasil Penjualan Aset Daerah   | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 2          | Penerimaan Jasa Giro  | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 3          | Pendapatan Bunga Deposito   | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 4          | Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 5          | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                 | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 6          | Pendapatan dari Pengembalian  | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>II</b>  | <b>DANA PERIMBANGAN</b>   |   |                  |
| <b>A</b>   | <b>BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>  |   |                  |
| 1          | Bagi Hasil PBB  | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 2          | Bagi Hasil PPh WPOPND, dan PPh Pasal 21   | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 3          | Bagi Hasil Sumber Daya Alam   | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>B</b>   | <b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>  |   |                  |
| 1          | Dana Alokasi Umum   | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>C</b>   | <b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>  |   |                  |
| 1          | Dana Alokasi Khusus   | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>III</b> | <b>LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>  |   |                  |
| <b>A</b>   | <b>PENDAPATAN HIBAH</b>   |   |                  |
| <b>B</b>   | <b>DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN PEMDA LAINNYA</b>                                   |   |                  |
| 1          | Bagi Hasil Pajak Provinsi   | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>C</b>   | <b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>  |   |                  |
| 1          | Dana Penyesuaian  | DPPKAD  | Pemungutan       |
| 2          | Dana Desentralisasi Fiskal  | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>D</b>   | <b>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMDA LAINNYA</b>                                  |   |                  |
| 1          | Bantuan Keuangan dari Provinsi  | DPPKAD  | Pemungutan       |
| <b>E</b>   | <b>SUMBANGAN PIHAK KETIGA</b>   | DPPKAD  | Pemungutan       |

BUPATI LUWU UTARA,


  
 JHAM A. GAZALING